

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan wilayah strategis di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar yang terbentuk sebagai zona perekonomian. Terdiri atas ribuan pulau yang memberntang luas dan membentuk berbagai wilayah administratif di dalamnya yang cukup berlapis.² Suatu pulau terdiri dari beberapa provinsi yang terbentuk dengan masing-masing pemerintahannya. Provinsi memiliki lapisan administratif berupa kota, kecamatan, dan desa. Kondisi geografis ini menimbulkan karakteristik secara sosial, ekonomi, dan sumber daya yang berbeda antar wilayah.³ Perbedaan ini menjadi faktor pendorong pembangunan yang lebih terdesentralisasi dan berbasis potensi lokal pada setiap lapisan wilayah.

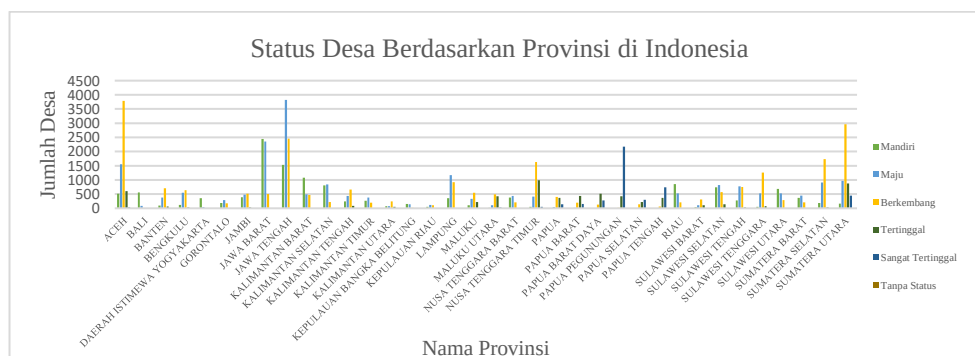
Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memegang peranan strategis dalam memperkuat basis ekonomi lokal sekaligus menaikkan kualitas hidup masyarakatnya secara komprehensif. Pembangunan desa menjadi aspek fundamental dalam upaya mewujudkan pertumbuhan

² Nofirman, *Geografi Maritim Indonesia* (Padang Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, 2026), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=dAPDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+indonesia+memiliki+ribuan+pulau+dan+wilayah+administratif&ots=Dpa-xWo3qc&sig=yFe6AgQh4j8GJN0Z6afL-gj_6Os&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+indonesia+memiliki+ribuan+pulau+dan+wila.

³ Lisa Astria Milasari et al., *Pengantar Perencanaan Wilayah Dan Kota* (Makassar: CV Tohar Media, 2019), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=y3uzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA153&dq=Provinsi+memiliki+lapisan+administratif+berupa+kota,+kecamatan,+dan+desain&ots=VGVeLwhIps&sig=-nWwy6cnkJJO6CNi3PJUitxpb2I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi desa secara spesifik disusun secara komposit agar dapat memberikan gambaran tingkat kemandirian dan perkembangan pembangunan desa berdasarkan dimensi dan indikator dalam Indeks Desa Membangun (IDM).⁴ Melalui Indeks Desa Membangun (IDM) pemerintah dapat mengukur ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu desa.⁵ Peningkatan status desa mandiri yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya merata, artinya skor desa pada Indeks Desa Membangun (IDM) masih rendah dan belum terpenuhi dari segi indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, maupun ketahanan lingkungannya.⁶

Grafik 1 Data Ketimpangan Status Desa di Berbagai Provinsi



Sumber: Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal 2024

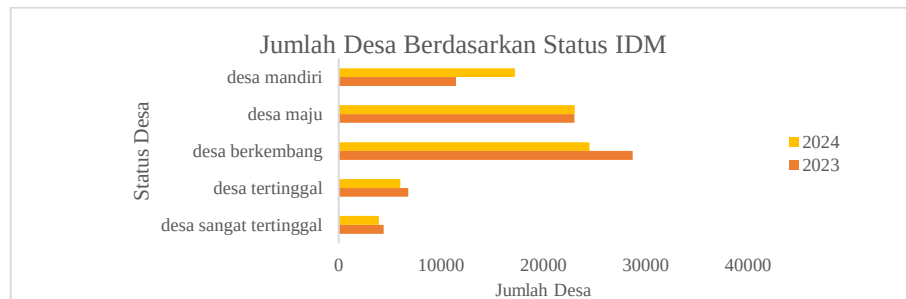
⁴ Sri Endang Rahayu, *Implementasi Kebijakan & Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa* (Medan: Umsu Press, 2023), https://www.google.co.id/books/edition/Monograf_Implementasi_Tata_Kelola_Penggu/eikREQA AQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=alat+ukur+indeks+desa+membangun&pg=PA106&printsec=frontcover.

⁵ Hamial Hamidi et al., *Indeks Desa Membangun (IDM)* (Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata no. 17 Jakarta Selatan, 2015), <https://kedsa.id/wp-content/uploads/2016/05/INDEKS-DESA-MEMBANGUN-final.pdf>.

⁶ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, "SOP IDM 2024," 2024, <https://drive.google.com/file/d/1DJqb66QfdkcAAfskngBIxSD8R2isEWiV/view>.

Data dari Kementerian Desa PDTT menunjukkan bahwa banyaknya desa mandiri mengalami kenaikan dari 11.456 (2023) menjadi 17.203 (2024). Namun, distribusi geografisnya masih mengalami ketimpangan terhadap status desa. Beberapa provinsi mencetak banyak desa mandiri, sementara wilayah lain masih didominasi oleh desa berkembang dan tertinggal.

Grafik 2. Data Jumlah Desa Berdasarkan Status Indeks Desa Membangun di Indonesia Tahun 2023-2024



Sumber: Kementerian Desa 2024

Berdasarkan pemaparan data, dapat di lihat bahwa banyaknya Desa Mandiri yang mengalami lonjakan di Indonesia memicu terjadinya ketimpangan antarwilayah. Beberapa provinsi menunjukkan naiknya status desa mandiri, sementara wilayah lain tetap didominasi pada status desa berkembang, status desa tertinggal, dan bahkan desa sangat tertinggal. Pencapaian status menunjukkan bahwa skor Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia bahkan masih belum merata dan terdapat beberapa desa yang berada di bawah batas skor 0,8155.

Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) seharusnya didukung oleh optimalisasi sumber pendanaan desa terutama Dana Desa, PADesa, dan potensi penerimaan zakat. Menurut penelitian dari Alif Hazmi

dan Mardianta penggunaan dana desa dipergunakan untuk mengubah status desa menjadi mandiri.⁷ Dana Desa sebagai sumber utama yang bersumber pada bagian dana keuangan pusat dan daerah untuk dapat memperbaiki kerusakan infrastruktur dasar, menaikkan kualitas pelayanan terhadap publik, dan menekan angka kesenjangan pembangunan antar desa.⁸ Pendanaan ini bisa direalisasikan dalam program pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan *skill*, mengembangkan perekonomian lokal, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa sebagai objek sekaligus subjek dalam realisasi pembangunan desa.⁹ Mengoptimalkan sumber pendanaan agar tidak selalu memiliki ketergantungan pada Dana Desa dan pada dana transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dapat didukung dengan potensi lokal melalui Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa mencerminkan kemandirian fiskal desa untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan mengupayakan kemandirian bukan hanya tercantum dalam pencapaian skor Indeks Desa Membangun (IDM) yang tinggi namun juga berdasarkan aslinya untuk mandiri secara finansial maupun pengelolaan potensinya sendiri.¹⁰

⁷ Alif Hazmi Istifazhuddin and Antun Mardianta, "Evaluation of the Implementation of the Village Fund Allocation Policy" 2, no. 1 (2025): 1–14.

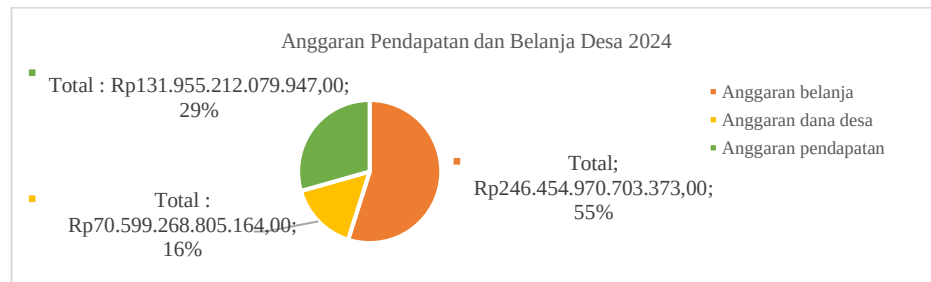
⁸ Sri Wahyuni and Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Bincar Nasution, *PT Inovasi Pratama Internasional* (Sumatera Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023), <https://ipinternasional.com/wp-content/uploads/2023/02/Full-Book-Monograf-Sri-Wahyuni-Pengelolaan-Dana-Desa-Demi-Kesejahteraan-Masyarakat.pdf>.

⁹ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2421/1/BUKU_AKUNTANSI_DANA_DESA.pdf.

¹⁰ Ilma Dwi Amaliah, "The Effect of Village Income, Village Fund Allocation, Tax Sharing and Retribution on Village Expenditures: A Case in Indonesia The Effect of Village Income, Village Fund Allocation, Tax Sharing and Retribution on Village Expenditures Accounting and Susta," *Accounting and Sustainability* 1, no. 1 (2022).

Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tingkat desa sehingga tercipta desa yang berkeadilan dan pemerataan pendapatan serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.¹¹

Grafik 3. Data Komposisi APBDes di Indonesia tahun 2024



Sumber: Kementerian Desa (PD TT)

Berdasarkan data dalam grafik di atas pada tahun 2024 jumlah total anggaran yang paling besar berada pada presentase anggaran belanja yaitu 55% dengan nominal sebesar Rp246.454.970.703. Setiap tahun, pemerintah desa memperoleh alokasi anggaran melalui transfer dana desa maupun pendapatan asli desa. Anggaran tersebut kemudian dikelola melalui APBDes yang menjadi instrumen utama dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa.¹²

Pengelolaan keuangan desa yang masih menghadapi permasalahan krusial seperti ketergantungan terhadap transfer pusat, dominasi belanja infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Data Komisi

¹¹ Rita Martini et al., "Poverty Reduction in South Sumatera with Optimization of Village Funds, Allocation of Village Funds, and Village Original Income," *Proceedings of the 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)* 641 (2022): 114–19, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220202.020>.

¹² Arif and Efri Syamsul Bahri, "Effectiveness of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDes) in Indonesia: Literature Review," *Journal of Multi-Disciplines Science (ICECOMB)* 3, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.59921/icecomb.v3i1.38>.

Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani Kasus korupsi Dana Desa yang tinggi dengan lebih dari 900 kasus di tahun 2023 telah melibatkan sekitar 400 kepala desa. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas menyebabkan penggunaan anggaran tidak efektif sehingga menghambat pembangunan dan meningkatkan ketimpangan antar wilayah di Indonesia.¹³ Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 973 orang yang terlibat dalam 800 lebih kasus penggelapan dana desa, dengan sekitar 50% di pelakunya adalah kepala desa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam hasil pembangunan desa yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sebagaimana ditekankan dalam SDGs poin 16 yaitu mewujudkan desa damai berkeadilan. Permasalahan tata kelola tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pendanaan desa tidak hanya terhambat oleh penyalahgunaan anggaran, melainkan disebabkan juga oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber dana alternatif yang seharusnya dapat memperkuat pembangunan desa seperti pada penerimaan dana zakat.

Zakat menjadi salah satu pilar dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya memiliki dimensi spiritual, namun juga dimensi sosial-ekonomi yang sangat kuat. Dalam praktiknya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi melakukan pengelolaan pada dana zakat baik zakat maal maupun zakat fitrah untuk disalurkan

¹³ Dekki Umamur, "Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024 Transparency and Accountability in Village Fund Management : An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024," *Journal of Administration & Development* 1, no. 2 (2024): 89–102.

kepada delapan golongan mustahik, yang mayoritas merupakan kelompok rentan secara ekonomi. Instrumen zakat dalam Islam sangat penting digunakan untuk mendorong dan memajukan perekonomian umat, di mana zakat potensinya cukup besar, terutama dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Potensi penerimaannya didapatkan dari dana zakat dapat dimaksimalkan dengan pengelolaan secara profesional sehingga harus ada inovasi dalam program penyalurannya serta disesuaikan seiring adanya peningkatan jumlah zakat yang dihimpun dan dikumpulkan.¹⁴ Data peningkatan jumlah dana zakat yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Total Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2023-2024 di Indonesia

Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)	
	2023	2024
Zakat Maal	3.712.155.272.483	4.350.099.606.318
Zakat Fitrah	384.984.047.170	618.668.807.899

Sumber : Laporan Pengelola Zakat Nasional (PPID BAZNAS RI)

Berdasarkan data penghimpunan zakat dapat diketahui bahwa jumlah total pengumpulan dana zakat per jenis dana mengalami kenaikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023. Dana pengumpulan dana zakat maal mengalami kenaikan sebesar Rp637.944.333.835 sedangkan pengumpulan dana zakat fitrah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp233.684.760.729. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai bukti keberhasilan lembaga

¹⁴ Labuhanbatu Dalam and Menanggulangi Kesenjangan, "Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Sosial Di Rantau Prapat" 15 (2025): 517–30.

pengelola zakat dalam meningkatkan sosialisasi, transparansi, serta optimalisasi saluran pendistribusian zakat kepada mustahik. Adanya kenaikan ini bukan hanya sekedar angka, melainkan mencerminkan potensi besar zakat sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Penghimpunan zakat nasional yang meningkat setiap tahun menunjukkan potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Namun ketiga sumber pendanaan ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial desa dengan salah satu contoh dibentuknya kampung zakat di Kabupaten Ciamis dan rumah zakat belum terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan desa untuk jangka menengah (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Padahal, jika merujuk pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM) khususnya dimensi ketahanan ekonomi, fungsi zakat menjadi mekanisme distribusi pendapatan yang adil, meminimalkan kesenjangan, meningkatkan akses terhadap modal usaha (melalui program zakat produktif), dan menguatkan ekonomi rumah tangga di desa.¹⁵

Pengelolaan dana desa baik pendapatan maupun pengeluaran harus dipantau melalui kebijakan fiskal. Berdasarkan Fiscal Decentralization Theory kewenangan dibagi atas dasar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pendapatan serta pengeluaran publik

¹⁵ Dedah Kuratulain, Agung Mulyana, and M Kaharudin Yasin, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis" 4, no. 2 (2025): 7082–98.

agar tercapai efisiensi dan keadilan fiskal terutama pada teori Generasi kedua yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran sesuai kebutuhan lokal.¹⁶ Dalam hal ini agar tidak ada ketergantungan pada Dana Desa dan pada dana transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, pemerintah desa juga harus mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui Pendapatan Asli Desa (PADesa) maupun dana filantorpi Islam seperti dana zakat.

Sementara itu, teori Maqashid Syariah terutama Hifz al-Mal dapat menguatkan peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil untuk memakmurkan masyarakat. Kedua teori ini dapat menguatkan pentingnya kemandirian fiskal desa dan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan berbasis nilai Islam.¹⁷ Sesuai tujuan ke-8 Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sumber dana zakat dapat digunakan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta lapangan kerja yang layak., serta pemerataan hasil pembangunan.¹⁸

Pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip ini berfokus pada menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia dengan menyeimbangkan pendistribusian harta baik secara personal maupun

¹⁶ Tiara J Ferry Prasetya, Tengku M. Chalil, *Two Decades of Fiscal Implementation Two Decades of Fiscal Decentralization*, 2021.

¹⁷ Binti Nur Asiyah et al., "Community Socio-Economic Involvement in the Islamic Boarding School Cooperative Model Based on Sharia Financial Technology," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2024): 59–83, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v11i1.14144>.

¹⁸ Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2018), https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf.

sosial.¹⁹ Oleh karena itu berdasarkan kondisi yang terjadi, Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya memiliki fungsi sebagai instrumen pengalokasian anggaran berjalan, melainkan sebagai dasar evaluasi dalam menentukan kebijakan anggaran tahun berikutnya sehingga keputusan pengelolaan dana dapat dilakukan secara lebih responsif dan transparan sesuai dengan sasaran. Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mengintegrasikan sumber daya non-APBDesa yaitu dana zakat ke dalam program pembangunan desa agar kontribusi zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih selaras dengan prioritas pembangunan desa dan berdampak langsung pada peningkatan IDM.

Penelitian dari Amran Manurung dkk Dana desa akan menghasilkan output pembangunan yang memiliki dampak bagi ekonomi masyarakat desa apabila direalisasikan secara baik dan sesuai berdasarkan tata kelola pemerintahan yang terstruktur.²⁰ Akses terhadap kebutuhan maupun fasilitas publik wajib dipermudah melalui pengalokasian dana desa sesuai dengan penelitian dari Fadillah Putra.²¹ Sementara itu penelitian dari Eri Trisihsukohandoyo dkk menyoroti bahwa desa dengan pendapatan yang

¹⁹ Fakrusyi Sahkirin Hibatur Rokhman, Sri Kamariyah, and Ika Devy Pramudiana, "Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa," *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 274–97, <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1289>.

²⁰ Amran Manurung et al., "Village Fund Policy : Measuring The Progress of Economic Development in Four Regency in the Toba Caldera Through the Village Development Indicator (IPD) and Village Building Index (IDM)," *International Conference On Health Science, Green Economics, Educational Review And Technology 2022*, 2022, 435–58.

²¹ Fadillah Putra, "Village Development Initiative as an Alternative Strategy of Rural Poverty Reduction: An Evaluation of Village Fund Program in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 05, no. 04 (2022): 1453–60, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i4-35>.

rendah akan sulit untuk mewujudkan suatu kemandirian.²² Adanya dukungan dana desa sebagai sumber keuangan terpusat akan memengaruhi capaian Indeks Desa Membangun. Kenaikan skor tersebut terjadi apabila dana dialokasikan dengan prinsip maqashid yariah di mana dalam penelitian dari Ismail Hasang menegaskan pengalokasian dana juga digunakan untuk pembinaan Badan Amil Zakat yang ada di desa meskipun dana publik dan dana zakat belum terintegrasi secara resmi.²³

Namun hingga kini, belum terdapat penelitian yang membahas keterpaduan Dana Desa, PADesa, dan dana zakat dengan ADD sebagai variabel intervening dalam memengaruhi capaian IDM secara nasional. Melalui metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif maka menjadi penting untuk mengisi gap tersebut dan memberikan dasar empiris bagi penguatan strategi pengelolaan Dana Desa, PADesa, dan Dana Zakat memengaruhi capaian Indeks Desa Membangun, serta pengaruh variabel intervening Alokasi Dana Desa mengintervensi hubungan antar variabel-variabel pembangunan desa yang menggabungkan dana publik dan filantropi Islam.

²² Marlina Ekawaty Trisihukohandoyo, Maryani, "Analysis of Potential Sources of Village Original Income, as An Effort to Improve Village Independence (Case Study of Four Villages in Gondang District, Tulungagung Regency)," *International Journal of Business Economics and Law* 23, no. 1 (2020): 281–87, <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALYSIS-OF-POTENTIAL-SOURCES-OF-VILLAGE-ORIGINAL-Trisihukohandoyo-Maryunani/8983bcf0dce3d420246ce7f07dbc82142ae3380c>.

²³ Kabupaten Pinrang, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah," *Al-Buhuts* 20, no. 1 (2024): 582–602.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diidentifikasi masalah-masalah terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan

a) Indeks Desa Membangun (Y)

Indeks Desa Membangun digunakan sebagai alat ukur status desa berdasarkan kondisi suatu desa. Terdapat banyak provinsi dengan desa berstatus mandiri namun terdapat pola yang berbeda di provinsi lain masih dengan status desa tertinggal.

b) Dana Desa (X1)

Dana Desa berasal dari keuangan pusat untuk membiayai pembangunan suatu desa. Namun optimalisasi dana desa dalam pembangunan secara produktif masih rendah yang cenderung digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur sehingga sulit untuk mewujudkan kemandirian suatu desa.

c) Pendapatan Asli Desa (X2)

Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil pengelolaan sumber daya lokal. Pengoptimalan pendapatan desa dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana desa. Pendapatan Asli Desa dengan jumlah kecil disebabkan oleh kurangnya identifikasi potensi desa dan kegiatan produktif di dalamnya.

d) Dana Zakat (X3)

Dana Zakat merupakan penerimaan harta tertentu setelah mencapai nisab dan haul kemudian dihimpun dari muzaki baik perorangan ataupun badan lembaga. Dana zakat belum tercatat secara sistematis dalam perencanaan pembangunan desa.

e) Alokasi Dana Desa (Z)

Pengalokasian dana desa dan dana zakat yang tidak tepat sasaran karena lebih berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan program sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

f) Dana Desa (X1), Pendapatan Asli Desa (X2), Dana Zakat (X3)

Penelitian ini terfokus pada tiga variabel Independen, yaitu Dana Desa (X1), Pendapatan Asli Desa (X2), Dana Zakat (X3) terhadap suatu variabel dependen yaitu Indeks Desa Membangun (Y). Belum optimalnya pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat dari ketimpangan capaian antar desa dalam IDM sehingga perlu dibantu oleh PADesa dan Dana Zakat.

2. Batasan Permasalahan

- a. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian yang dibatasi hanya pada pada Provinsi yang ada di Indonesia.
- b. Variabel penelitian Pembangunan Desa bersumber dari Dana Desa (DD) , Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Dana Zakat.

- c. Anggaran Pendapatan sebagai faktor yang dapat memengaruhi pembangunan desa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia meliputi Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan mewujudkan kemandirian suatu Desa dengan peningkatan skor Indeks Desa Membangun (IDM).

C. Rumusan Masalah

Pembangunan desa menjadi fokus utama dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sumber pendanaan seperti Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Dana Zakat. Capaian IDM antar wilayah tentu tidak selalu sama dan masih menunjukkan ketimpangan yang mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan ketiga sumber dana tersebut. Oleh karena itu, perlu dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia tahun 2024?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024?
3. Bagaimana pengaruh Dana Zakat Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024?
4. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024?
5. Bagaimana pengaruh Dana Desa Terhadap Alokasi Dana Desa?
6. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Alokasi Dana Desa?
7. Bagaimana Pengaruh Dana Zakat Terhadap Alokasi Dana Desa?

8. Bagaimana pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024 Melalui Intervensi Alokasi Dana Desa?
9. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024 Melalui Intervensi Alokasi Dana Desa?
10. Bagaimana pengaruh Dana Zakat Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024 Melalui Intervensi Alokasi Dana Desa?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran berbagai sumber pendanaan desa dalam mendukung pembangunan dan kemandirian masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Zakat Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa Terhadap Alokasi Dana Desa di Indonesia tahun 2024.
6. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Alokasi Dana Desa di Indonesia tahun 2024.

7. Untuk menganalisis pengaruh Dana Zakat Terhadap Alokasi Dana Desa di Indonesia tahun 2024.
8. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024 melalui intervensi Alokasi Dana Desa.
9. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024 melalui intervensi Alokasi Dana Desa.
10. Untuk menganalisis pengaruh Dana Zakat Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia tahun 2024 melalui intervensi Alokasi Dana Desa.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk lingkup ilmu ekonomi syariah, terkhusus dalam pembahasan pengaruh dana desa, pendapatan asli desa, dan dana zakat sebagai pilar philanthropy Islam terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) dengan variabel intervening Alokasi Dana Desa di Indonesia.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi lembaga resmi Badan Amil Zakat Nasional

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bahan studi terkait pengintegrasian dengan perencanaan pembangunan desa secara sistematis untuk mengukur manfaat yang bisa dirasakan oleh

penerima zakat, sehingga terwujud pembangunan desa yang adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

b. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan edukasi untuk menentukan dan membuat kebijakan pengalokasian dana desa dan juga pencatatan zakat yang dimulai dari tingkat desa.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam memperluas wawasan dan ilmunya dalam bidang ekonomi syariah dengan menambahkan variabel baru yang relevan dengan pengaruh anggaran pendapatan desa dan philanthropy Islam terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia melalui alokasi dana desa sebagai variabel intervening.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan secara konseptual

Perbedaan persepsi perlu dihindari dengan menjabarkan istilah-istilah yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah suatu instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan desa-desa di Indonesia.²⁴ Instrumen ini menggunakan skor untuk mengkategorikan suatu desa pada status tertentu.

²⁴ Ade Fartini, David Nugraha, and Ahmad Sudira, *Pemerintah Berskala Desa Terhadap Indeks Desa Membangun* (Serang: A-Empat, 2024).

b. Dana Desa

Dana desa adalah sumber daya yang didanai secara terpusat untuk administrasi publik, membiayai pembangunan desa, serta untuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa..²⁵

c. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah seluruh penerimaan desa yang bersumber dari hasil pengelolaan potensi sumber daya desa secara mandiri. Pendapatan Asli Desa ini berbentuk unit usaha desa melalui BUMDes, hasil aset desa, swadaya, dan partisipasi masyarakat..²⁶

d. Dana Zakat

Dana zakat adalah dana yang dikenakan atas harta tertentu setelah mencapai nisab dan haul kemudian dihimpun dari muzaki baik perorangan ataupun badan lembaga dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam untuk didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat..²⁷

²⁵ Muhamad Muiz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=FJs_EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dana+Desa+adalah+dana+yang+bersumber+dari+keuangan+pusat+&ots=FqutBqg3qC&sig=614-G2wRngbDJiTXt6hMgAfctHs&redir_esc=y#v=onepage&q=Dana+Desa+adalah+dana+yang+bersumber+dari+keuangan.

²⁶ Ana Sepanah, Beni Kurniawati, and Dwi Anggraini, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ST6xEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+tentang+Pendapatan+Asli+Desa+adalah+seluruh+penerimaan+desa+yang+berasal+dari+hasil+pengelolaan+potensi+sumber+daya+desa&ots=M_9RzY1vQq&sig=AYN1Lhgm92w3Eb3noriuADoQh0s&redir_.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Zakat* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2019), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ml28DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+tentang+Dana+zakat+adalah+dana+yang+dikenakan+atas+harta+tertentu+setelah+mencapai+nisa+b+dan+haul+&ots=PeAofZ6JAv&sig=2_P2_i-TW9gKxdH85S3sJJsNusaTenggaraTimurQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fa.

e. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana pemerataan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara proporsional.²⁸

2. Penegasan secara Operasional

Penelitian ini mencakup beberapa variabel utama yang berkaitan dengan pembangunan dan kemandirian suatu desa di Indonesia. Pada penelitian ini secara operasional mengkaji pengaruh Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Dana Zakat terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai variabel Intervening. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengaruh variabel independen Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Dana Zakat terhadap variabel dependen Indeks Desa Membangun (IDM) melalui variabel Intervening Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia di tahun 2024.

²⁸ Riana Mayasari et al., *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dan Pengelolaan Keuangan* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024), https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Rreferensi_Akuntabilitas_Alokasi_Dan/zqL6EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=buku+tentang+Alokasi+Dana+Desa+adalah+bagian+dari+dana+permbangan+keuangan+pusat+dan+daerah&pg=PA48&printsec=frontcover.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisi tentang permasalahan yang disusun secara sistematis dan akan dibahas secara mendalam dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal: bagian ini berisi dari halaman sampul depan, halaman, judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabe, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I Pendahuluan: bagian ini menguraikan kondisi pembangunan desa serta peran Anggaran Pendapatan Desa maupun Dana Zakat, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah. Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: bagian ini berisi teori-teori seperti Indeks Desa Membangun (IDM), Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Dana Zakat, dan Alokasi Dana Desa. Diperkuat dengan hasil studi sebelumnya yang topik atau variabelnya sama dalam susunannya berdasarkan rumusan masalah. Dilegkapi model hubungan antara APBDes, dana zakat, dan IDM dalam bentuk bagan atau skema. Kerangka konseptual ini memperjelas arah analisis dan hubungan logis antarvariabel. Beserta hipotesis penelitian akan diuji secara empiris.

BAB III Metode Penelitian: bagian ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, serta teknik analisis yang digunakan multistage sampling seluruh provinsi di Indonesia.

BAB IV Hasil Penelitian: bagian ini berisi hasil analisis data yang dilakukan melalui uji *Outer Model*, *Inner Model*, dan Uji Hipotesis.

BAB V Pembahasan: bagian ini menguraikan hasil temuan analisis untuk menjawab rumusan masalah terkait Anggaran Pendapatan Desa dapat mempengaruhi pembangunan desa berkelanjutan pada bab sebelumnya dengan mengaitkannya pada teori, konsep, dan penelitian terdahulu.

BAB VI Penutup: bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian disertai dengan implikasi dan rekomendasi peneliti.

3. Bagian Akhir: bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dokumen, dan daftar riwayat hidup peneliti.